

**IMPLEMENTASI PELAPORAN KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH
(Studi Kasus pada RSUD Tugurejo Tahun 2018)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

NURULITA IRMAYA ADELINA

NIM. 12030114120066

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nurulita Irmaya Adelina
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114120066
Fakultas/ Departemen : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PELAPORAN KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (Studi Kasus pada RSUD
Tugurejo Tahun 2018)**
Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu P., S.E., M.Si., Akt., Ph.D

Semarang, 19 November 2018

Dosen Pembimbing,

Tri Jatmiko Wahyu P., S.E., M.Si., Akt., Ph.D

NIP. 19711026 200003 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Nurulita Irmaya Adelina
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114120066
Fakultas/ Departemen : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PELAPORAN KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (Studi Kasus pada RSUD
Tugurejo Tahun 2018)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 5 Desember 2018

Tim Penguji

1. Tri Jatmiko Wahyu P., S.E., M.Si., Akt., Ph.D (.....)
2. Herry Laksito, S.E., M.Adv., Acc., CA., Ak., CACP (.....)
3. Adi Firman Ramadhan., S.E., M.Ak (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nurulita Irmaya Adelina, menyatakan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua! pada Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus pada RSUD Tugurejo Tahun 2018), adalah hasil tulisan tangan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang,

Yang membuat pernyataan,

Nurulita Irmaya Adelina

NIM. 12030114120066

ABSTRACT

This study aims to describe how the implementation of accrual based in the financial report of hospitals. This study focused on the Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUDs are formed to provide services to the community without seeking profits based on the principles of efficiency and productivity. BLUDs carried out accounting and financial statements using an accrual basis. The location of this study is RSUD Tugurejo. This study used qualitative descriptive approach with interview and observation methods of employees in the accounting sub section RSUD Tugurejo as parties directly involved in hospital financial reporting. Data from interviews and observation was analyzed by using Miles and Huberman model and categorized as major determinants on implementing accrual based RSUD financial report. The result showed that determinants which affected on implementing accrual based in financial reports were accounting and information technology based system, commitment from the leader, competent human resources, and resistance to change. The four determinants related each other. The manual accounting system was chosen when a computerized and integrated accounting system was not ready to be used which required competent human resources to use it. Commitment from leaders who support the application of accrual basis accounting were needed to realize the acceptance of accrual basis accounting.

Keywords: RSUD, financial reporting, accrual, determinant

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual pada rumah sakit. Lokasi penelitian difokuskan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual.

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi terhadap pegawai sub bagian akuntansi RSUD Tugurejo sebagai pihak yang terlibat langsung terhadap pelaporan keuangan rumah sakit. Hasil wawancara dan observasi dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pembahasan dalam implementasi pelaporan keuangan RSUD yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai saat RSUD Tugurejo berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Faktor-faktor yang menjadi pembahasan dalam pelaporan keuangan RSUD adalah sistem akuntansi dan teknologi informasi, komitmen dari pimpinan, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, dan resistensi terhadap perubahan.

Keempat faktor pembahasan saling berkaitan. Sistem akuntansi manual dipilih saat sistem akuntansi yang terkomputerisasi dan terintegrasi belum siap digunakan yang untuk menggunakannya dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Komitmen dari pimpinan yang mendukung penerapan akuntansi basis akrual diperlukan untuk mewujudkan penerimaan akuntansi basis akrual.

Kata kunci: RSUD, pelaporan keuangan, akrual, faktor

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Penulis telah menyelesaikan skripsi tentang “Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua pada Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus pada RSUD Tugurejo Tahun 2018)” dengan baik.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dan senantiasa membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Fuad, M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Tri Jatmiko Wahyu P., S.E., M.Si., Akt., Ph.D selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Darsono, S.E., Akt., MBA selaku dosen wali saya yang telah memberikan arahan dan dukungan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama di kampus sebagai dasar penulisan skripsi ini.
6. Karyawan dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas dukungan dan bantuannya kepada saya.
7. Kepala dan Staf Sub Bagian Akuntansi RSUD Tugurejo Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber dan terlibat dalam proses skripsi ini.
8. Bapak Muntari dan Ibu Kartini, kakak saya Septian Harris Almuarif, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Teman-teman akuntansi 2014. Semoga Allah memberikan *ridho* dan kesuksesan bagi kita semua.
10. Organisasi di kampus: Teater Buih, KESMES (Kelompok Studi Masalah Ekonomi dan Sosial), Peduli Dhuafa Mizan Kompartemen, dan Sosmas BEM UNDIP (Sosial Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro)
11. GAMANANTA (Dika, Santi, Vika, Sandi, Oby, Dhanis, dan Faiz) untuk dukungan dan kesan yang mendalam bagi saya.
12. Sahabat seperjuangan (Santi Widia Sari, Indah Puspita, dan Muthmainnah Azzahra) untuk segala keceriaan, kebersamaan, dan selalu siap membantu saya.

13. Sahabat baik (Firlyana, Hanidia, Nurmala, dan Ulin) untuk kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain.
14. Tim II KKN Desa Troso (Yoma, Dondy, Monika, Fira, Meylin, Anggun, Mayza, Johan, dan Adi) untuk kebersamaan, keceriaan, motivasi, dan ilmu-ilmu yang mendewasakan. BPH dan teman-teman Tim II KKN Kecamatan Pecangaan Jepara atas kekompakan dan kerjasamanya.
15. Pihak lain yang telah membantu namun tidak dapat dituliskan satu persatu.

Semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menantikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Semarang,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4 Fokus Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Transisi Akuntansi Kas menuju Akuntansi Akrua.....	12

2.2 Akuntansi Berbasis Akrual	20
2.3 Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.....	22
2.4 Telaah Penelitian Sebelumnya.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.1 Penelitian Kepustakaan	31
3.2.2 Wawancara	31
3.2.3 Observasi Lapangan	32
3.2.4 Analisis Dokumen	32
3.3 Teknik Analisis Data	33
3.4 Lokasi Penelitian.....	36
3.5 Sejarah dan Perkembangan RSUD Tugurejo.....	36
3.6 Informan.....	38
3.7 Batasan Penelitian.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Profil RSUD Tugurejo	41
4.2 Kesiapan Penerapan Basis Akrual pada Pelaporan Keuangan RSUD Tugurejo.....	42
4.2.1 Laporan Posisi Keuangan.....	44

4.2.2	Laporan Realisasi Anggaran	77
4.3	Implementasi Pelaporan Keuangan Basis Akrua RSUD Tugurejo	91
4.3.1	Sistem Akuntansi dan <i>IT Based System</i>	93
4.3.2	Komitmen dari Pimpinan	97
4.3.3	Tersedianya SDM yang Kompeten	100
4.3.4	Penerimaan Terhadap Akuntansi Basis Akrua.....	103
BAB V PENUTUP.....		108
5.1	Simpulan	108
5.2	Keterbatasan.....	109
5.3	Saran	110
DAFTAR PUSTAKA		111
LAMPIRAN.....		113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan RSUD Tugurejo terkait dengan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan	24
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.6 Daftar Nama dan Inisial Narasumber.....	39
Tabel 4.2.1 Draf Bagan Akun Laporan Posisi Keuangan RSUD Tugurejo.....	44
Tabel 4.2.2 Draf Bagan Akun Laporan Realisasi Anggaran RSUD Tugurejo ...	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan RSUD Tugurejo terkait dengan Status Kelembagaan	23
Gambar 3.3 Model Analisis Miles dan Huberman	35

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Pertanyaan Wawancara	113
Lampiran B Transkrip Wawancara dan Observasi	117
Lampiran C Hasil Coding	149
Lampiran D Struktur Organisasi RSUD Tugurejo	162
Lampiran E Daftar Tugas Jabatan Narasumber	163

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi politik dan pergeseran kekuasaan politik cenderung mempengaruhi sistem akuntansi dan managerial di sektor publik (Mimba et al., 2007; Chang, 2009; Harun, et al., 2012). Pengaruh reformasi dan pergeseran kekuasaan terhadap sistem akuntansi dan managerial di sektor publik tersebut dapat pula dirasakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Reformasi sektor publik telah mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir, dan cara tata kelola yang baru menuntut tuntutan baru pada sistem akuntansi dan informasi (Nyland, K. and Pettersen, I. J. 2011; Broadbent and Laughlin, 2009; Moll and Hoque, 2008). Artinya perubahan tata kelola sektor publik harus diikuti dengan pembaharuan sistem akuntansi dan informasi. Sistem akuntansi dan informasi yang tepat diharapkan mampu memberikan perubahan pada sektor publik menuju tata pengelolaan pemerintah yang baik. Dalam beberapa tahun belakangan, adopsi sistem akuntansi berbasis akrual semakin tersebar luas pada beberapa organisasi sektor publik di negara berkembang (Agasisti, et al., 2015).

Olson et al. (1998) mengungkapkan bahwa akuntansi akrual pada sektor publik merupakan salah satu dari gagasan yang dicetuskan dalam *New Public Management* (NPM). NPM berawal dari teori manajemen yang pada dasarnya beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik bisnis komersial dan manajemen sektor publik.

Scott et al., (1990) menjelaskan pada teori NPM bahwa akuntansi akrual dianggap penting untuk menunjukkan kekurangan informasi yang tersedia saat ini pada organisasi sektor publik yang memperhatikan biaya dan nilai dari aset. Menyadari pentingnya penerapan akuntansi akrual ini maka beberapa negara di dunia telah menerapkan akuntansi akrual, salah satunya yaitu New Zealand.

Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Salah satu usaha penerapan akuntansi akrual di Indonesia dengan menerbitkan Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (MAKUDA) (Bastian, 2001). MAKUDA sebagai latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagai langkah awal pemerintah dalam implementasi penyusunan sistem akuntansi berbasis akrual.

Implementasi penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual pada organisasi sektor publik diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Tahun 2005 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) membentuk Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disahkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2005 untuk menjembatani penyesuaian penerapan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual (*cash toward accruals*). Implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual seharusnya sudah diterapkan pada tahun 2008. Menindaklanjuti PP Nomor 24 Tahun 2005 diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Sektor publik di Indonesia wajib melakukan pelaporan keuangan berbasis akrual di tahun 2015.

Adanya PP Nomor 24 Tahun 2005 menunjukkan bahwa perubahan pelaporan keuangan tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan penyesuaian dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi basis akrual dengan *cash toward accruals*. Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik.

Akuntansi berbasis akrual tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat namun juga pada pemerintah daerah. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 7 ayat 3 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.” Untuk penerapan di pemerintah daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 64 Tahun 2013 yang menyatakan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015. Dengan demikian pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual.

SAP basis akrual diantaranya wajib diterapkan oleh Badan Layanan Umum (BLU). BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Sesuai dengan pengertian BLU maka dalam melakukan kegiatannya, BLU didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktifitas. Dalam pengelolaan keuangan BLU, pembinaan keuangan antara BLU pemerintah pusat dan BLU pemerintah daerah dilaksanakan secara terpisah. Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh menteri keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan BLU pemerintah daerah, pembinaan keuangan dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Meskipun demikian, BLU pemerintah pusat maupun BLU pemerintah daerah keduanya sama-sama menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Penggunaan basis akrual pada BLU pemerintah daerah diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 61 Tahun 2007 menyatakan BLUD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual.

Sebagai perangkat kerja pemerintah daerah, BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ada dua belas jenis layanan pada BLUD yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yaitu Layanan Kesehatan, Layanan Pendidikan, Layanan Dana Bergulir dan Dana Perumahan,

Layanan Pengelolaan Air, Layanan Transportasi, Layanan Terminal dan Perparkiran, Layanan Kawasan, Layanan Wisata, Layanan Pasar, Layanan Olahraga, Layanan Layanan Alat Berat, dan Layanan Kelautan dan Perikanan. Diantara dua belas jenis layanan BLUD, layanan kesehatan merupakan layanan dengan jumlah unit terbanyak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, hingga tahun 2014 jumlah unit BLUD layanan kesehatan di Indonesia berjumlah 497 unit yang terdiri dari 356 unit layanan kesehatan berstatus BLUD penuh dan 141 unit layanan kesehatan berstatus BLUD bertahap. Data menunjukkan BLUD rumah sakit sebagai bagian dari layanan kesehatan dengan jumlah unit terbanyak yaitu sejumlah 279 unit yang terdiri dari 260 unit rumah sakit dengan status BLUD penuh dan 19 unit rumah sakit dengan status BLUD bertahap. (www.keuda.kemendagri.go.id)

Rumah sakit merupakan suatu lembaga dimana untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi diperlukan profesionalisme yang andal dalam hal pengelolaan lembaga bisnis yang modern. Praktik-praktik akuntansi menjadi pusat permasalahan yang terjadi pada penerapan penyedia-pembeli di sektor rumah sakit pemerintah karena akuntansi terkait dengan proses untuk membuat organisasi tersebut terlihat jelas dan dapat dihitung (Miller et al., 2008; Nyland, K. and Pettersen, I. J. 2011). Artinya meskipun rumah sakit pemerintah merupakan bagian organisasi publik yang memberikan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, transaksi yang terjadi di rumah sakit tetap harus dicatat dengan praktik akuntansi yang benar sehingga kegiatan rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi akuntansi berbasis akrual pada rumah sakit bertujuan menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik (*cost of services*) dan penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik (*charging for services*).

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981 tahun 2010 tentang pedoman akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit, dasar penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Pengakuan pendapatan pada rumah sakit tidak sepenuhnya menggunakan basis akrual. BLU Rumah Sakit dituntut selalu siap memberikan pelayanan terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana, tenaga serta dana untuk mendukung pelayanan. Dalam pengelolaan sumber daya, BLU rumah sakit dituntut dapat menyajikan data dan informasi yang akurat serta tersaji tepat waktu bagi kepentingan berbagai pihak.

Tujuan laporan keuangan BLU rumah sakit adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk memenuhi kepentingan donatur, investor, kreditur, otoritas pengawasan, pemerintah, dan masyarakat. Pelaporan keuangan rumah sakit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen rumah sakit dalam menjalankan aktivitas operasi untuk itu diperlukan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu laporan keuangan rumah sakit beserta teknik penyusunannya merupakan hal yang penting untuk diketahui guna meningkatkan kualitas penggunaan anggaran dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan disusunnya laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna. Kesesuaian sistem yang digunakan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan perlu diperhatikan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan beberapa peraturan pemerintah untuk mendukung implementasinya, akuntansi akrual diharapkan diterapkan pada organisasi sektor publik. Namun, implementasi ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh organisasi sektor publik secara keseluruhan sesuai harapan pemerintah, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan implementasi akuntansi akrual untuk tercapainya tujuan laporan keuangan perlu disesuaikan.

Di sejumlah rumah sakit di Indonesia terjadi berbagai tindak kasus kejahatan dalam hal pelaporan keuangan, diantaranya:

- (1) Penyimpangan di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan pada tahun 2012 mencapai 2,3 milyar rupiah. Pendapatan BLUD disajikan lebih rendah dan barang dan/atau jasa disajikan lebih rendah dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penyimpangan bersifat administratif RSUD di Jakarta. Adanya barang namun tidak ada atau tercecernya bukti administratif sebagai bukti.

- (3) Pembelian lahan RS Sumber Waras tahun 2014. Terdapat selisih harga yang dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan harga kesepakatan antara RS Sumber Waras dengan PT CKU. Selisih mencapai 191 milyar rupiah.
- (4) Kasus RSUD Embung Fatimah, Batam tahun 2016-2017. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan sejumlah pelanggaran diantaranya pembayaran utang tidak dicatat di neraca, pembayaran utang ke pegawai yang belum dibayarkan, tagihan utang ke pihak ketiga yang tidak tercatat pada neraca, pengadaan belanja alat tulis kantor yang tidak sesuai ketentuan, kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai, pengadaan fiktif belanja barang habis pakai, pembayaran fiktif atas utang belanja RSUD, masalah program pengadaan obat yang berakibat pada kosongnya stok obat, dan transaksi fiktif lainnya.

Berdasarkan beberapa kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi yang tepat diperlukan untuk meminimalisir tindak kejahatan dalam hal pelaporan keuangan di rumah sakit. Sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dengan menyajikan hasil yang lebih teliti dan informatif termasuk dalam pengelolaan keuangan di rumah sakit. Permasalahan tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku implementasi. Kesiapan SDM menghadapi perubahan, sehingga penting memahami kemampuan SDM dalam implementasi akuntansi basis akrual.

Penelitian sebelumnya tentang akuntansi akrual oleh Tutik Sulasmi pada tahun 2017 studi kasus di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi Semarang, menyimpulkan bahwa:

“Walaupun telah melakukan persiapan sejak awal, penerapan akuntansi basis akrual masih menyisakan permasalahan. Pelaku menengarai permasalahan yang terjadi terkait peraturan dan sistem informasi yang belum memadai. Kedua permasalahan ini menandakan ketidakpastian pemerintah dalam mengawal penerapan akuntansi basis akrual di sektor publik.”

Kemudian untuk penelitian selanjutnya, Sulasmi (2017) menyarankan:

“... penelitian selanjutnya dengan konsep yang sama dan konteks yang sama maupun berbeda, namun membawa kebaharuan ide dan mengusung alat analisis yang berbeda, diharapkan akan semakin membuka wawasan dan memperkaya literatur penelitian.”

Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman sebagai alat analisis data. Fokus penelitian ini mengarah pada kesiapan dari pelaku implementasi akuntansi basis akrual di satuan kerja pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah, dalam hal ini RSUD Tugurejo Semarang. Selain memahami kesiapan dari pelaku, penelitian ini juga akan mengungkapkan permasalahan yang terjadi dari penerapan akuntansi basis akrual. Penerapan akuntansi basis akrual tentu memerlukan penyesuaian oleh pelaku di lapangan.

Rumusan masalah tersebut menjadi dasar pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana kesiapan RSUD Tugurejo terhadap penerapan akuntansi basis akrual?
2. Apa permasalahan dari penerapan akuntansi basis akrual di RSUD Tugurejo?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi akuntansi berbasis akrual pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai organisasi sektor publik. Penelitian ini dapat menjadi jawaban bagaimana RSUD menghadapi kendala yang dihadapi pada transisi basis akuntansi berbasis kas menuju akrual. Berbagai tahapan perubahan kebijakan basis akuntansi dalam perkembangannya untuk mengatasi keterbatasan dan mencapai ketersediaan informasi yang dapat dipercaya. Sebagaimana dalam Pasal 7 PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa, “penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual.”

1.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang berkaitan dengan implementasi akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada saat implementasi akuntansi berbasis akrual pada sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian digambarkan dalam susunan berikut:

1.5.1 Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, fokus penelitian,

dan sistematika penulisan. Bab ini juga menggambarkan penerapan akuntansi akrual di sektor publik, respons yang diambil pemerintah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, dan pertimbangan yang mendasari penelitian ini dilakukan.

1.5.2 Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini berisikan tentang telaah pustaka yang menjadi landasan penelitian dan telaah penelitian sebelumnya. Bab ini memberikan gambaran tentang transisi akuntansi kas menuju akrual pada sektor publik di Indonesia, akuntansi berbasis akrual pada sektor publik di Indonesia, pelaporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan telaah penelitian sebelumnya.

1.5.3 Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas desain penelitian yang dipilih untuk mengembangkan penelitian, teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dan informasi, teknik analisa untuk mengolah data dan informasi, lokasi penelitian, sejarah dan perkembangan RSUD Tugurejo, informan, dan batasan penelitian.

1.5.4 Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan profil RSUD Tugurejo dan implementasi pelaporan keuangan basis akrual RSUD Tugurejo.

1.5.5 Bab V : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.